



WANSANSA
CONVENTION CENTER
JAKARTA



**GREEN ECONOMIC
OUTLOOK
2026**

25 Luwansa, Jakarta December 11 2025

"Strengthening Economic Resilience through ESG Integration"

Sponsored by BRI PERTAMINA

J.S.
HOTEL

Green Economic Outlook 2026

Recap

Sebagai rangkaian dari



Januari, 2026

Outline

- 01 Strengthening Economic Resilience through ESG Integration
- 02 Key Highlights of the Green Economic Outlook 2026
- 03 Key Takeaways: Shaping Indonesia's Green Economy Transformation



Strengthening Economic Resilience through ESG Integration

Perkembangan ekonomi global dan nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha. Tantangan perubahan iklim, percepatan transisi energi, serta tuntutan terhadap keberlanjutan sosial-ekonomi mendorong transformasi mendasar dalam cara bisnis beroperasi dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, paradigma green economy hadir sebagai kerangka utama yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Memasuki tahun 2026, arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin dipengaruhi oleh komitmen nasional menuju *Net Zero Emissions*, penguatan penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta peningkatan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan tidak lagi dinilai semata dari kinerja finansial, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Perubahan lanskap regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan ini menuntut kesiapan strategis yang lebih matang dari seluruh pelaku usaha.

Dalam dinamika tersebut, peran *Corporate Secretary* menjadi semakin krusial sebagai garda terdepan dalam memastikan integrasi antara kepatuhan, komunikasi

strategis, manajemen risiko, dan pelaporan keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan. Kompleksitas tantangan keberlanjutan tidak dapat dihadapi secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mengidentifikasi peluang, memahami risiko, serta merumuskan strategi adaptif yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.



Publikasi ini merangkum pemikiran, perspektif, dan pembelajaran utama yang disampaikan oleh para narasumber dalam acara *Green Economic Outlook 2026* yang diselenggarakan oleh ICSA dan Olahkarsa. Rangkuman ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi para profesional dan pengambil keputusan dalam memahami arah ekonomi hijau Indonesia, perkembangan regulasi, peluang investasi berkelanjutan, serta praktik terbaik dalam integrasi ESG guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Key Highlights of the Green Economic Outlook 2026

Strengthening Governance and Transparency in the Capital Market

Teuku Fahmi Ariandar | Vice Director of Listed Company Regulation and Services of IDX

Penguatan tata kelola dan transparansi kini menjadi agenda strategis dalam pengembangan pasar modal Indonesia. Dalam pemaparan pada Green Economic Outlook 2026, Bursa Efek Indonesia (IDX) menegaskan bahwa investasi berkelanjutan tidak lagi diposisikan sebagai tren sementara melainkan sebagai salah satu pilar utama dalam membangun pasar modal yang kredibel, kompetitif, dan relevan dengan tantangan global. ESG dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kepercayaan investor sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam adopsi prinsip keberlanjutan. IDX telah meluncurkan berbagai indeks berbasis ESG seperti IDX ESG Leaders, IDX LQ45 Low Carbon Leaders, dan SRI-KEHATI yang menjadi rujukan bagi investor dalam menempatkan dananya pada perusahaan dengan kinerja keberlanjutan yang baik. Produk investasi pasif berbasis ESG termasuk reksa dana dan ETF juga mengalami pertumbuhan pesat tercermin dari peningkatan nilai dana kelolaan yang melonjak berlipat ganda. Di sisi pembiayaan, penerbitan *Green, Social, and Sustainability (GSS) Bonds* dan Sukuk terus meningkat sejak 2018, hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan berkelanjutan semakin diminati oleh pasar.

Perbaikan juga terlihat dari sisi emiten dengan terungkapnya semakin banyak perusahaan tercatat yang menyampaikan laporan keberlanjutan. Adapun kualitas kinerja ESG emiten menunjukkan tren positif tercermin dari peningkatan skor penilaian keberlanjutan dan ESG rating dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mulai memandang ESG bukan sekadar kewajiban kepatuhan melainkan sebagai bagian dari strategi bisnis dan manajemen risiko jangka panjang.

Untuk memperkuat ekosistem ini, IDX mengembangkan berbagai inisiatif strategis. Berbagai inisiatif tersebut diantaranya adalah pengembangan indeks ESG baru,



kolaborasi dengan bursa regional dan global, penyediaan website dan platform disclosure keberlanjutan, serta program-program seperti Net Zero Incubator dan pengembangan perdagangan karbon. Selain itu, IDX juga mendorong insentif bagi penerbitan sustainability bonds dan pengembangan green equity serta melakukan edukasi berkelanjutan kepada pelaku pasar agar integrasi ESG semakin matang dalam keputusan investasi.

Standarisasi pengungkapan menjadi elemen penting dalam agenda ini. IDX mendorong penggunaan metrik ESG yang seragam dan selaras dengan regulasi OJK termasuk POJK No. 51/2017 dan SEOJK No. 16/2021. Dengan adanya metrik yang terstruktur, data ESG menjadi lebih mudah dibandingkan sehingga investor dapat menilai risiko dan peluang keberlanjutan secara lebih objektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu perusahaan melacak target keberlanjutan mereka, mengidentifikasi isu-isu ESG yang material, serta membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Bagi investor, ketersediaan data ESG yang lebih baik memperkuat dasar pengambilan keputusan dan mendorong praktik investasi yang lebih bertanggung jawab

Melalui berbagai inisiatif tersebut, IDX menegaskan perannya sebagai penggerak utama transformasi pasar modal menuju arah yang lebih berkelanjutan. ESG dijadikan fondasi untuk menciptakan lebih banyak variasi produk investasi, meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, memperbaiki skor ESG perusahaan, serta menarik arus

modal yang lebih besar ke pasar modal Indonesia. Dengan tata kelola yang kuat dan transparansi yang terus diperbaiki, pasar modal Indonesia diharapkan mampu menjadi destinasi utama bagi investasi berkelanjutan di kawasan.

Sustainable Finance Initiative of Bank Indonesia

Ribka Hanum Haryono | Senior Analyst, Green Economics-Finance Group of Bank Indonesia

Transformasi menuju ekonomi dan keuangan berkelanjutan menjadi agenda strategis Bank Indonesia dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dalam pemaparan pada Green Economic Outlook 2026, Bank Indonesia menegaskan bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi sumber risiko serius bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter, dan sistem keuangan. Tanpa aksi mitigasi dan adaptasi yang efektif, dampak ekonomi perubahan iklim diperkirakan dapat menimbulkan kerugian lebih dari Rp100 triliun per tahun dan bahkan berpotensi mencapai 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2048, jauh di atas rata-rata kerugian global yang diperkirakan sebesar 18% PDB. Angka ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat menjadi faktor penghambat utama pembangunan ekonomi jangka panjang.

Kerentanan Indonesia terhadap dampak iklim sangat tinggi. Sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor maritim dan agraris, serta jutaan penduduk tinggal di wilayah pesisir, Indonesia sangat rentan terhadap banjir, kekeringan, badai, gelombang tinggi, dan kenaikan muka air laut. Dampak tersebut tidak hanya merusak infrastruktur dan aset, tetapi juga menurunkan produktivitas pangan dan mengganggu distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan volatilitas harga. Selain risiko fisik, terdapat pula risiko transisi, yaitu risiko yang muncul akibat perubahan menuju ekonomi rendah karbon, seperti stranded assets, ketidakpastian harga energi, serta pergeseran preferensi investor dan konsumen ke produk hijau. Jika Indonesia terlambat bertransisi, risiko transisi ini justru akan semakin besar dan mahal secara ekonomi.

Dari perspektif moneter dan sistem keuangan, perubahan iklim berdampak langsung terhadap stabilitas. Risiko fisik dapat meningkatkan volatilitas harga karena gangguan produksi pangan dan distribusi, serta menekan nilai tukar akibat perubahan preferensi investor dan penurunan ekspor. Di sisi sistem keuangan, sektor-sektor yang rentan terhadap iklim menghadapi peningkatan risiko kredit. Aset-aset yang tidak lagi sesuai dengan arah transisi hijau berpotensi menjadi stranded assets, sehingga melemahkan neraca perbankan. Selain itu, sektor non-hijau akan menghadapi premi risiko yang lebih tinggi dan akses pembiayaan yang semakin terbatas. Kondisi ini



menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi makro dan ketahanan sistem keuangan.

Untuk merespons tantangan tersebut, Indonesia menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060. Strategi utama menuju target ini mencakup peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi, pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan teknologi rendah karbon, serta pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). Namun, transisi ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) hingga 2030, Indonesia diperkirakan membutuhkan pembiayaan sebesar USD 281 miliar. Dari total tersebut, sektor energi menyerap kebutuhan terbesar, yakni sekitar USD 245,9 miliar, disusul sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) sekitar USD 21,9 miliar, serta sektor limbah, pertanian, dan proses industri dengan nilai yang lebih kecil. Angka ini menunjukkan bahwa tanpa mobilisasi keuangan berkelanjutan yang masif, target iklim Indonesia akan sulit tercapai.



Dalam konteks inilah peran Bank Indonesia menjadi krusial. Sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia mengembangkan kebijakan keuangan berkelanjutan melalui tiga pilar utama yaitu mendorong pembiayaan berkelanjutan dari sisi penawaran, mengembangkan UMKM berkelanjutan dari sisi permintaan, serta membangun kelembagaan dan praktik berkelanjutan di internal Bank Indonesia sendiri.

Dari sisi pembiayaan, Bank Indonesia mendorong perbankan menjadi katalis transisi hijau. Bank tidak lagi hanya menilai kelayakan debitur dari aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan emisi karbon debitur dalam pemberian kredit dan penentuan suku bunga. Konsep *financed emissions* diterapkan, di mana emisi debitur secara proporsional diakui sebagai emisi bank. Hal ini mendorong bank untuk secara bertahap mereposisi portofolionya ke pembiayaan rendah emisi. Untuk mempercepat proses ini, Bank Indonesia memberikan berbagai insentif, seperti pelonggaran *Loan to Value* hingga 100% untuk Kredit Pemilikan Rumah berwawasan hijau dan uang muka 0% untuk kendaraan listrik, serta insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan pembiayaan hijau dan memenuhi rasio pembiayaan inklusif.

Di sisi permintaan, Bank Indonesia mengembangkan UMKM hijau melalui Pedoman Model Bisnis UMKM Hijau yang diterbitkan pada 2024 untuk sektor pertanian dan kerajinan. UMKM diklasifikasikan dalam tiga tahap antara lain *eco-adopter*, yaitu UMKM yang mulai mengadopsi praktik ramah lingkungan; *eco-entrepreneur*, yaitu UMKM yang menjadikan keberlanjutan sebagai inti model bisnis; dan *eco-innovator*, yaitu UMKM yang melakukan inovasi berkelanjutan pada produk, proses, dan organisasinya.

Terdapat 24 indikator yang mencakup aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan untuk menilai kesiapan UMKM dalam bertransisi. Melalui pendampingan, pelatihan, dan *business matching*, UMKM diharapkan mampu menangkap peluang pasar hijau yang terus tumbuh.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, Bank Indonesia juga mengembangkan Kalkulator Hijau versi 01. Alat ini dapat digunakan secara sukarela dan gratis oleh perbankan serta pelaku usaha untuk menghitung emisi dari aktivitas usaha, baik dari emisi langsung (Scope 1), penggunaan listrik (Scope 2), maupun pengurangan emisi melalui energi terbarukan, kendaraan listrik, dan *carbon offset*. Kehadiran kalkulator ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan emisi sekaligus membantu pelaku usaha menyusun strategi penurunan emisi secara terukur.

Di bidang pelaporan, Ikatan Akuntan Indonesia berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan OJK menyusun Standar Pengungkapan Keberlanjutan yang diluncurkan pada Agustus 2025, terdiri dari PSPK 1 dan PSPK 2. PSPK 1 mengatur pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan secara umum, sedangkan PSPK 2 secara khusus mengatur risiko dan peluang terkait iklim. Keduanya mencakup aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target, sehingga laporan keberlanjutan perusahaan menjadi lebih terstruktur, relevan, dan dapat dibandingkan.

Seluruh kebijakan ini diperkuat melalui koordinasi lintas otoritas dalam Komite Keuangan Berkelanjutan yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan kementerian sektoral lainnya. Tujuannya adalah membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang mencakup infrastruktur penghitungan emisi, taksonomi keuangan berkelanjutan, pasar karbon, serta literasi keuangan hijau bagi masyarakat dan pelaku usaha.



Melalui pendekatan berbasis data dan kebijakan yang terintegrasi ini, Bank Indonesia menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi ekonomi nasional. Dengan risiko perubahan iklim yang dapat menggerus ratusan triliun rupiah setiap tahun dan kebutuhan pembiayaan ratusan miliar dolar menuju *net zero*, keuangan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh, inklusif, dan selaras dengan daya dukung lingkungan.



Opportunities and Challenges of Indonesia's Green Economy

Luthfi Ridho | Economist of National Economic Council

Ekonomi hijau diposisikan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai arah pembangunan baru Indonesia yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini tidak lagi memisahkan antara agenda ekonomi dan agenda lingkungan, melainkan menyatukannya dalam satu kerangka pembangunan yang menekankan efisiensi sumber daya, dekarbonisasi, dan peningkatan nilai tambah ekonomi domestik. Ekonomi hijau dipahami sebagai respons rasional terhadap dunia yang semakin penuh ketidakpastian akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan fragmentasi ekonomi global.

Pemaparan DEN diawali dengan konteks global yang menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi risiko ekonomi utama. Jika suhu global meningkat hingga 3°C, kerugian ekonomi dunia diproyeksikan mencapai sekitar 6,67% dari PDB global pada 2060. Bahkan pada 2030 saja, dampak ekonomi perubahan iklim diperkirakan sudah mencapai 1,24% dari PDB dunia. Kenaikan suhu di atas 1,5°C akan membuat sekitar 14% populasi dunia mengalami gelombang panas ekstrem setiap lima tahun sekali, sekitar 210 juta orang terdampak kekeringan parah, dan sekitar 290 juta rumah terancam banjir pesisir dengan potensi kerusakan aset lebih dari USD 14 triliun. Selain itu, perubahan iklim menurunkan kualitas gizi tanaman dan berisiko memicu masalah kesehatan bagi sekitar 600 juta orang. Data ini menegaskan bahwa perubahan iklim adalah ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi, pangan, dan kesehatan global.

Di saat yang sama, ekonomi global berada dalam kondisi sangat tidak pasti. IMF tercatat merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 sebanyak empat kali, mencerminkan cepatnya perubahan arah ekonomi dunia. Ketidakpastian ini diperparah oleh konflik geopolitik, volatilitas harga energi dan pangan, kebijakan moneter ketat di negara maju, serta dampak iklim. Arus investasi global juga menunjukkan tren melemah dalam jangka panjang, dengan penurunan tajam setelah krisis global dan pandemi. Dalam situasi ini, negara yang mampu menawarkan proyek hijau yang kredibel dan berkelanjutan akan memiliki keunggulan dalam menarik investasi.

Dalam konteks global tersebut, ekonomi hijau dipandang sebagai strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. DEN menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi hijau, terutama dari sumber daya alam dan bonus demografi. Potensi energi terbarukan nasional diperkirakan lebih dari 3.600 GW, namun yang dimanfaatkan baru kurang dari



1%. Kesenjangan ini menunjukkan besarnya peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis energi bersih.

Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan meningkat menjadi sekitar 31% pada 2050. Realisasi saat ini masih jauh dari target, sehingga periode 2025–2035 dipandang sebagai fase krusial percepatan transisi energi. Pada fase ini, pembangunan pembangkit EBT skala besar, penguatan jaringan transmisi, pengembangan penyimpanan energi, dan integrasi EBT ke sistem kelistrikan menjadi prioritas. Transisi ini membutuhkan investasi lebih dari USD 1 triliun hingga 2060, namun juga berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja hijau, menguatkan industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.

Transformasi industri menjadi industri hijau juga menjadi pilar utama ekonomi hijau. Industri saat ini menyumbang porsi besar konsumsi energi dan emisi nasional. DEN mendorong empat strategi utama: efisiensi energi, elektrifikasi proses produksi, pemanfaatan energi terbarukan, dan adopsi teknologi rendah karbon seperti hidrogen hijau dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). Transformasi ini penting untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama menghadapi kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang akan mengenakan biaya tambahan pada produk beremisi tinggi.

Sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan juga menjadi bagian integral ekonomi hijau. Indonesia menargetkan sektor FOLU menjadi net sink pada 2030, dengan serapan karbon lebih besar dari emisinya. Upaya ini mencakup pengendalian deforestasi, restorasi hutan dan gambut, serta pengelolaan mangrove. Dengan luas mangrove lebih dari 3 juta hektare, Indonesia memiliki potensi besar ekonomi biru dari perdagangan karbon biru, perikanan berkelanjutan, hingga ekowisata, yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pesisir.

Ekonomi hijau juga didukung oleh pengembangan ekonomi sirkular. Model linear “ambil-pakai-buang” harus digantikan dengan model yang menekankan pengurangan limbah, penggunaan ulang, dan daur ulang. Sektor pengelolaan sampah, industri daur ulang, dan pemanfaatan limbah sebagai bahan baku baru dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Dari sisi makroekonomi, DEN menekankan bahwa ekonomi hijau bukan penghambat pertumbuhan. Tanpa transisi hijau, perubahan iklim akan terus menggerus pertumbuhan melalui bencana, penurunan produktivitas, dan kerusakan aset. Sebaliknya, skenario ekonomi hijau menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat dijaga di kisaran 5% per tahun, dengan struktur ekonomi yang lebih efisien, rendah karbon, dan berbasis inovasi.

Tantangan utama ekonomi hijau terletak pada pembiayaan dan tata kelola. Kebutuhan investasi yang sangat besar tidak dapat hanya mengandalkan APBN. Oleh karena itu, diperlukan mobilisasi pembiayaan dari sektor swasta, perbankan, pasar modal, dana pensiun, dan pembiayaan

internasional. Instrumen seperti green bond, sukuk hijau, blended finance, pasar karbon, dan insentif fiskal menjadi kunci. Di sisi lain, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan investor.

Ekonomi hijau juga harus dijalankan secara adil dan inklusif. Transisi dari ekonomi berbasis fosil akan berdampak pada pekerja dan daerah penghasil energi fosil. Oleh karena itu, konsep just transition menjadi bagian penting, melalui program reskilling tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja alternatif, dan perlindungan sosial selama masa transisi.

Dengan menggabungkan konteks global yang penuh risiko dan agenda nasional yang kaya potensi, DEN menegaskan bahwa ekonomi hijau adalah strategi pembangunan masa depan Indonesia. Ia bukan hanya tentang menurunkan emisi, tetapi tentang membangun ekonomi yang efisien dalam menggunakan sumber daya, tangguh terhadap krisis iklim dan geopolitik, kompetitif di pasar global, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi generasi kini dan mendatang.



The Financial Sector's Role in Driving Indonesia's Green Economy Transition

Josua Pardede | Chief Economist of PT Permata Tbk

Sektor keuangan diposisikan sebagai aktor kunci dalam mempercepat transisi ekonomi hijau Indonesia. Dalam pemaparan Permata Bank pada forum ICSA, ditegaskan bahwa perubahan iklim dan agenda dekarbonisasi tidak hanya berdampak pada sektor riil, tetapi juga langsung memengaruhi stabilitas sistem keuangan melalui risiko kredit, risiko pasar, dan perubahan perilaku investor. Oleh karena itu, perbankan dan pasar keuangan tidak lagi sekadar menjadi penyedia dana, melainkan penentu arah transformasi ekonomi menuju model yang lebih hijau dan berkelanjutan.



Dari sisi pembiayaan, data OJK menunjukkan bahwa kredit perbankan ke aktivitas berkelanjutan terus meningkat secara nominal. Nilai pembiayaan berkelanjutan oleh bank umum tumbuh dari sekitar Rp5.769 triliun pada 2021 menjadi sekitar Rp7.827 triliun pada 2024. Namun, rasio pembiayaan berkelanjutan terhadap total kredit justru cenderung menurun dalam dua tahun terakhir, berada di kisaran 25–27%. Artinya, meskipun nilai absolutnya naik, laju pertumbuhan kredit konvensional masih lebih cepat dibandingkan kredit hijau. Pembiayaan ini tersebar di berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, efisiensi energi, bangunan hijau, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, hingga UMKM berwawasan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa ekosistem keuangan hijau sudah terbentuk, tetapi masih perlu diperkuat agar porsinya lebih signifikan dalam struktur pembiayaan nasional.



Di tingkat bank, Permata Bank menunjukkan contoh konkret bagaimana portofolio pembiayaan berkelanjutan dapat tumbuh cepat. Pada 2024, pembiayaan Permata Bank di beberapa kategori melonjak tajam, khususnya pada energi terbarukan, pencegahan dan pengendalian polusi, serta pengelolaan sumber daya hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan. Selain itu, pembiayaan untuk bangunan hijau, produk eco-efficient, transportasi ramah lingkungan, dan UMKM hijau juga terus meningkat. Hal ini menegaskan bahwa permintaan terhadap pembiayaan hijau mulai terbentuk, baik dari korporasi besar maupun pelaku usaha skala menengah dan kecil.

Namun, transisi hijau di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang besar, terutama karena ketergantungan ekonomi terhadap batu bara. Pada 2023, sektor pembangkit listrik dan panas menyumbang sekitar 49,5% emisi CO₂ Indonesia, disusul sektor transportasi 22,3% dan industri 19,4%. Batu bara masih menjadi tulang punggung energi nasional: pada 2024, sekitar 60,9% listrik Indonesia dihasilkan dari batu bara. Di sisi fiskal, penerimaan negara bukan pajak dari batu bara dan mineral pada 2024 mencapai sekitar Rp102 triliun, ekspor batu bara menghasilkan devisa sekitar USD 37,8 miliar, dan produksi batu bara mencapai lebih dari 836 juta ton. Cadangan yang masih cukup untuk lebih dari 38 tahun membuat banyak pemangku kepentingan cenderung mempertahankan batu bara dalam jangka panjang. Selain itu, subsidi listrik dalam

APBN 2026 direncanakan sekitar Rp104,6 triliun, sehingga peralihan ke energi terbarukan yang berpotensi menaikkan biaya listrik juga menjadi isu sensitif secara politik dan fiskal.

Ketergantungan ini menciptakan risiko transisi yang besar bagi sektor keuangan. Data menunjukkan bahwa investasi langsung, baik asing maupun domestik, ke sektor batu bara meningkat tajam pasca-boom komoditas pandemi, meskipun mulai melambat pada 2025. Provinsi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan sangat bergantung pada investasi batu bara. Jika fase penurunan batu bara dilakukan terlalu cepat tanpa persiapan, daerah-daerah ini akan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial.

Dari perspektif perbankan, eksposur terhadap sektor tambang juga meningkat. Sejak pandemi, kredit perbankan ke sektor pertambangan dan penggalian tumbuh dua digit hampir setiap tahun. Perbandingan antara harga batu bara dan rasio kredit bermasalah (NPL) menunjukkan bahwa ketika harga batu bara turun, risiko NPL sektor tambang meningkat. Jika transisi global menekan harga batu bara secara struktural, maka risiko kredit perbankan Indonesia akan meningkat signifikan, terutama bagi bank yang portofolionya terkonsentrasi di sektor ini.



Risiko transisi tidak hanya berasal dari batu bara. Menurut IMF, sebagian besar sektor ekonomi Indonesia tergolong sensitif terhadap kebijakan iklim, baik karena intensitas emisi, ketergantungan energi fosil, maupun paparan terhadap perubahan regulasi dan teknologi. Dalam pasar saham, sektor energi, material dasar, industri, dan infrastruktur memiliki porsi besar dan sangat sensitif terhadap kebijakan transisi. Dalam portofolio kredit perbankan, sektor seperti industri pengolahan, pertanian, konstruksi, transportasi, real estat, listrik, gas, air, serta pertambangan juga tergolong rentan. Ketika kebijakan iklim diperketat, perusahaan di sektor-sektor ini menghadapi peningkatan biaya, risiko aset terdampar (stranded assets), dan kenaikan probabilitas gagal bayar.

IMF juga memproyeksikan bahwa di bawah skenario target iklim yang lebih ambisius, banyak perusahaan di sektor sensitif akan mengalami kenaikan probabilitas gagal bayar. Namun, sektor tertentu seperti teknologi informasi dan real estat justru berpotensi diuntungkan oleh transisi hijau, dengan penurunan risiko gagal bayar. Ini menunjukkan bahwa transisi hijau tidak hanya menciptakan risiko, tetapi juga peluang struktural bagi sektor-sektor tertentu.

Transisi batu bara juga membawa dampak sosial yang besar. Penutupan tambang diperkirakan akan menggeser ratusan ribu pekerjaan, terutama di Kalimantan dan Sumatra. Pekerja tambang, sopir truk, serta masyarakat di sekitar tambang merupakan kelompok paling rentan. Tanpa kebijakan just transition seperti pelatihan ulang, penciptaan lapangan kerja alternatif, dan jaring pengaman sosial transisi hijau berisiko memicu ketimpangan dan instabilitas sosial.

Di tingkat sistemik, perubahan iklim dan transisi hijau menciptakan dua jenis risiko utama: risiko fisik dan risiko transisi. Risiko fisik berasal dari bencana akut dan perubahan iklim kronis yang merusak aset dan menurunkan produktivitas. Risiko transisi berasal dari perubahan kebijakan, teknologi, dan preferensi konsumen. Keduanya berdampak pada sektor riil terlebih dahulu, lalu merambat ke sektor keuangan melalui peningkatan risiko kredit, perubahan harga aset, pergeseran sentimen investor, dan kenaikan biaya modal bagi sektor beremisi tinggi. Dalam jangka pendek, transisi bisa mendorong kenaikan harga dan tekanan inflasi, tetapi dalam jangka panjang justru memicu lonjakan investasi hijau yang menjadi sumber pertumbuhan baru.

Karena itu, skenario terbaik adalah transisi yang tertib dan kredibel (orderly and credible transition). Dalam skenario ini, penurunan batu bara dilakukan bertahap, kebijakan dapat diprediksi, dan energi terbarukan dikembangkan secara realistis. Dampaknya adalah pertumbuhan tetap stabil, inflasi terkendali, dan risiko perbankan dapat dikelola. Sebaliknya, transisi yang terlalu cepat dan tidak tertata dapat memicu lonjakan inflasi dan pengangguran, sementara transisi yang terlalu lambat dan tidak kredibel akan meningkatkan kerusakan iklim jangka panjang, tekanan dagang internasional, dan risiko fiskal serta keuangan.

Dalam kerangka ini, sektor keuangan memiliki peran strategis: mengalihkan pembiayaan dari sektor berisiko tinggi ke sektor hijau, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, mengelola risiko iklim dalam penilaian kredit dan investasi, serta mendukung transisi yang adil. Dengan mengarahkan modal ke energi terbarukan, industri hijau, transportasi bersih, dan UMKM berkelanjutan, sektor keuangan tidak hanya menjaga stabilitasnya sendiri, tetapi juga menjadi motor utama transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau yang tangguh, inklusif, dan kompetitif.

Strengthening Economic Resilience through ESG Integration

Anton Hendranata | Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Peran sektor perbankan dalam transisi ekonomi hijau tidak hanya terbatas pada penyaluran kredit hijau, tetapi juga pada pembentukan arah pembangunan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dalam forum Green Economic Outlook 2026, BRI menegaskan bahwa integrasi ESG merupakan strategi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan perubahan iklim, volatilitas global, serta perubahan preferensi investor dan masyarakat.

BRI mengawali pemaparannya dengan mengkritisi asumsi klasik Environmental Kuznets Curve (EKC) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan memperbaiki kualitas lingkungan melalui kemajuan teknologi. Data global justru menunjukkan sebaliknya ditunjukkan pada analisis Swiss Re yang memperkirakan bahwa perubahan iklim dapat memangkas GDP hingga dua digit, terutama di kawasan Asia dan ASEAN. Artinya, banyak negara berisiko mengalami penurunan ekonomi akibat krisis iklim sebelum sempat mencapai "titik balik" perbaikan lingkungan seperti yang diasumsikan dalam teori EKC. Dengan regresi OLS atas data 1990–2019, hubungan pertumbuhan ekonomi global dan emisi CO₂ dalam kondisi business as usual justru cenderung berbentuk "U", yang berarti dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dapat kembali mendorong kenaikan emisi jika tidak disertai transformasi struktural.

Temuan ini juga relevan untuk Indonesia. Analisis Economist Group BRI menunjukkan bahwa secara historis terdapat korelasi negatif antara emisi CO₂ dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan regresi Newey, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap emisi CO₂ bernilai -0,19, yang berarti kenaikan emisi 1% dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,19% dalam jangka pendek, ceteris paribus. Dalam analisis VAR, kenaikan emisi memang sempat mendorong pertumbuhan di awal, namun dalam jangka panjang justru menekan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi turun akibat kenaikan emisi, risiko bagi sektor perbankan juga meningkat karena pendapatan masyarakat dan kemampuan bayar kredit ikut melemah.

Dalam konteks inilah BRI memposisikan ESG sebagai strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban pelaporan. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah adanya *financing gap* untuk agenda keberlanjutan. Kebutuhan pendanaan Indonesia untuk mencapai target NDC diperkirakan mencapai sekitar USD 758 miliar atau setara Rp12.000 triliun hingga 2035. Di sisi lain, pembiayaan UMKM masih sangat terbatas: hanya sekitar 18,4% dari total kredit perbankan yang mengalir ke UMKM, sementara sekitar 44 juta atau 70% UMKM belum memiliki akses pembiayaan formal. Kesenjangan ini menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BRI mengembangkan portofolio kredit berkelanjutan sesuai POJK No. 18/2023. Hingga September 2025, porsi kredit berkelanjutan BRI telah mencapai sekitar 63% dari total pinjaman. Nilai portofolio kredit berkelanjutan mencapai sekitar Rp715,6 triliun, dengan porsi *social loan* sekitar 56% dan *green loan* sekitar 7,1% dari total portofolio. Produk yang dikembangkan mencakup *sustainability-linked loan*, KPR hijau, KPR subsidi, serta pembiayaan untuk energi terbarukan, efisiensi energi, pengendalian polusi, penggunaan lahan berkelanjutan, transportasi hijau, bangunan hijau, dan produk *eco-efficient*.

Dari sisi pendanaan, portofolio wholesale berkelanjutan BRI per 9M 2025 mencapai sekitar Rp86,06 triliun, dengan komposisi instrumen seperti *green bond*, *social bond*, surat berharga berbasis inklusivitas, *ESG loan*, dan *ESG repo*. Ini

menunjukkan bahwa pembiayaan berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada kredit ritel dan komersial, tetapi juga pada instrumen pasar keuangan. BRI juga mulai mengelola risiko iklim secara sistematis melalui *Climate Risk Stress Testing* (CRST) yang selaras dengan peta jalan OJK tentang manajemen risiko iklim dan analisis skenario. Tahap pertama CRST pada Juli 2024 mencakup sekitar 71,41% portofolio BRI, dan tahap kedua mencakup 100% portofolio yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan 2024. Dari sisi emisi pembiayaan, sektor listrik, gas, dan AC *supply* menyumbang sekitar 56,84% dari *financed emissions*, diikuti manufaktur 27,29% dan pertambangan 10,44%. Temuan ini menjadi dasar bagi BRI untuk menyusun kebijakan pembiayaan sektor spesifik, termasuk kelapa sawit, kehutanan, kertas, kelistrikan, minyak dan gas, serta batu bara.

Selain pembiayaan, BRI juga menurunkan emisi operasional dengan memasang panel surya di 143 kantor cabang dan menggunakan 796 kendaraan ramah lingkungan (*hybrid* dan EV). Langkah ini menegaskan bahwa komitmen hijau tidak hanya diterapkan pada nasabah, tetapi juga pada operasional internal. Pada dimensi sosial, BRI menekankan bahwa ekonomi hijau harus berjalan seiring dengan inklusi sosial. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK menunjukkan bahwa pada 2025 tingkat inklusi keuangan mencapai sekitar 80,5%, namun literasi keuangan baru sekitar 66,5%, sehingga terdapat kesenjangan signifikan antara akses dan pemahaman. BRI berkontribusi sekitar 64,5% terhadap tingkat inklusi keuangan nasional tersebut. Melalui pembiayaan mikro, transaksi multi-channel, asuransi mikro, serta program pemberdayaan seperti Desa Brilian (4.909 desa), Klaster Bisnis (41.715 klaster), dan 13,6 juta pengguna UMKM, BRI mendorong ekonomi hijau yang inklusif dan berbasis komunitas.

Dari sisi tata kelola, BRI membangun kepercayaan pemangku kepentingan melalui *responsible leadership*. Tekanan terhadap tata kelola semakin besar dengan terlihat bahwa 88% investor global kini memprioritaskan data ESG (EY, 2024), sementara OJK mencatat kerugian akibat fraud internal sektor perbankan mencapai Rp4,62 triliun pada 2023. Karena itu, BRI memperkuat sistem *whistleblowing* yang dikelola pihak ketiga independen, kebijakan *non-retaliation*, serta komitmen terhadap integritas dan pencegahan *fraud*.



Leveraging ESG Integration to Drive Corporate Advantage

Triana Krisandini | SVP Sustainability of PT TBS Energi Utama Tbk

Transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya digerakkan oleh negara dan sektor keuangan, tetapi juga oleh korporasi yang secara sadar mengubah model bisnisnya. Salah satu contoh konkret adalah perjalanan transformasi perusahaan yang berangkat dari basis energi fosil menuju portofolio bisnis rendah karbon. Dalam kerangka jangka panjang, visi keberlanjutan dirumuskan ke dalam agenda TBS2030, yaitu arah transformasi perusahaan menuju masa depan yang berkelanjutan dengan empat pilar utama: lingkungan yang tangguh, manusia yang berdaya, kemitraan yang tepercaya, serta target unggulan berupa netral karbon pada 2030. Agenda ini mencakup isu perubahan iklim, perlindungan lahan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan air, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, inklusivitas, pengembangan talenta, etika bisnis, praktik investasi yang bertanggung jawab, serta transparansi pengungkapan. Di dalam kerangka ini, risiko iklim dipahami sebagai risiko finansial, sehingga strategi bisnis harus mampu memitigasi risiko sekaligus membuka peluang pertumbuhan rendah karbon.

Perjalanan transformasi tersebut dimulai dari latar belakang sebagai perusahaan berbasis batu bara. Sejak IPO pada 2012, portofolio bisnis masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan tambang batu bara. Namun, sejak 2021 arah strategis berubah dengan lahirnya visi TBS2030. Periode 2022–2023 ditandai dengan akuisisi bisnis energi terbarukan dan mobilitas listrik, dilanjutkan dengan masuk ke sektor pengelolaan limbah pada 2025 melalui akuisisi Sembwaste (CORA). Pada tahun yang sama, divestasi PLTU dilakukan, menandai langkah tegas keluar dari bisnis berbasis batu bara. Target akhirnya adalah menjadi pemimpin industri rendah karbon dan "local champion" pada 2030.

Hingga kini, sekitar USD 374 juta telah diinvestasikan ke bisnis rendah karbon di dua negara, dengan lebih dari 1.000 karyawan terlibat dalam portofolio baru. Arah bisnis secara jelas bergeser dari pembangkit listrik dan tambang batu bara menuju tiga sektor utama antara lain pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik. Strategi dekarbonisasi dijalankan melalui tiga tuas utama yaitu percepatan dekarbonisasi aset lama (divestasi 200 MW PLTU dan rencana penghentian tiga konsesi tambang batu bara sebelum 2027), pertumbuhan agresif bisnis rendah karbon dengan rencana investasi total USD 600 juta hingga 2030, serta dekarbonisasi operasional dan penguatan tata kelola ESG.

Dampak dari pergeseran portofolio ini tercermin pada tren emisi. Emisi Scope 1 dan 2 menunjukkan penurunan seiring

dengan divestasi aset berbasis batu bara dan bertambahnya porsi bisnis hijau. Emisi dari operasi PLTU yang sebelumnya mencapai lebih dari 1,3 juta ton CO₂e per tahun mulai turun signifikan setelah divestasi dan masuknya aset energi terbarukan serta pengelolaan limbah. Target jangka panjangnya adalah mencapai kondisi netral karbon pada 2030, seiring dengan berkurangnya kontribusi tambang batu bara dan meningkatnya kontribusi kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah.

Komitmen ini juga tercermin dalam struktur belanja modal. Pada 2022, sekitar 45% belanja modal sudah dialokasikan untuk bisnis non-batu bara. Pada kuartal pertama 2025, hampir seluruh belanja modal mendekati 100% telah diarahkan ke sektor non-batu bara. Hingga Q1 2025, dari target USD 600 juta investasi rendah karbon, sekitar USD 374 juta sudah terealisasi. Ini menunjukkan bahwa transisi bukan lagi rencana di atas kertas, tetapi telah diterjemahkan ke dalam keputusan investasi nyata. Transformasi tersebut tidak dilepaskan dari penguatan tata kelola. Pengawasan dilakukan melalui komite ESG, integrasi risiko iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan, penguatan kualitas data emisi melalui *limited assurance*, serta transparansi pengungkapan. Di sisi eksternal, perusahaan juga membuka peluang kemitraan melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan dan kolaborasi di ekosistem pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan mobilitas hijau.



Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan, contoh ini menunjukkan bahwa teori “pertumbuhan akan memperbaiki lingkungan dengan sendirinya” tidak cukup. Tanpa perubahan struktur bisnis, pertumbuhan justru memperparah tekanan lingkungan dan pada akhirnya merusak fondasi ekonomi itu sendiri. Sebaliknya, ketika transformasi dilakukan secara sadar dengan mengalihkan investasi, menata ulang portofolio, dan mengintegrasikan ESG ke dalam strategi, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan dapat berjalan seiring.

Advancing Sustainability Integration in Business to Strengthen Market Competitiveness

Siti Nurmaya Rahmayani | Group Head Corporate Strategy and Sustainability of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis semakin menentukan daya saing perusahaan, khususnya di sektor energi yang berada di pusat agenda transisi rendah karbon. Dalam konteks dunia yang mendekati ambang 1,5°C, tuntutan kepatuhan iklim semakin ketat, arus investasi bergeser ke instrumen hijau, dan risiko iklim mulai dipandang sebagai risiko finansial yang nyata. Perubahan ini memaksa perusahaan energi untuk tidak lagi hanya berfokus pada ekspansi volume, tetapi juga pada ketahanan, efisiensi, dan kesiapan menghadapi transisi.

Di tengah dinamika tersebut, gas alam diposisikan sebagai “*bridging fuel*” dari energi fosil menuju energi terbarukan. Secara intensitas emisi, gas menghasilkan sekitar 53,1 tCO₂/BBTU, jauh lebih rendah dibanding batu bara yang mencapai 95,7 tCO₂/BBTU, atau sekitar 50–60% lebih rendah. Dengan peran ini, gas menjadi solusi transisi untuk menurunkan emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan energi nasional. Pada 2024, distribusi gas mencapai sekitar 852 BBTUD kepada lebih dari 816 ribu pelanggan, termasuk lebih dari 810 ribu rumah tangga, serta sektor komersial, industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Skala ini menunjukkan bahwa transisi energi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran gas dalam jangka menengah.

Namun, transisi tidak cukup hanya dengan mengganti bahan bakar. Integrasi ESG diposisikan sebagai inti dari strategi operasional dan bisnis. Pendekatan ini terbukti berdampak langsung pada keandalan, keselamatan, dan efisiensi biaya. Upaya seperti peningkatan efisiensi energi, deteksi kebocoran, predictive maintenance, sistem SCADA, pemantauan geohazard, dan pemodelan risiko pipa bukan hanya meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga menurunkan *downtime* dan *flaring* yang berarti menghemat

Kisah transformasi korporasi ini melengkapi peran negara, pasar modal, dan sektor keuangan yang telah dibahas sebelumnya. Negara menyiapkan kebijakan dan arah, pasar modal menyediakan instrumen dan transparansi, sektor keuangan mengalihkan pembiayaan, dan korporasi menerjemahkannya dalam keputusan bisnis nyata. Di titik inilah ekonomi hijau menjadi lebih dari sekadar wacana: ia menjadi strategi bersama untuk menjaga ketahanan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.



biaya sekaligus menurunkan emisi. Dengan kata lain, ESG tidak dipahami sebagai beban, melainkan sebagai alat untuk mencapai operational excellence dan ketahanan aset.

Dekarbonisasi juga dijalankan melalui pengembangan produk dan solusi rendah karbon. Salah satunya adalah pengembangan biomethane dan BioCNG dari limbah seperti POME (*Palm Oil Mill Effluent*) melalui proses biogas fermenter dan upgrading. Distribusi biomethane ditargetkan mencapai sekitar 10.000 ton per tahun pada tahap awal dan meningkat hingga 100.000 ton per tahun pada 2030, dengan potensi penurunan emisi sekitar 150.000 tCO₂e per tahun. Selain itu, pengembangan distribusi bahan bakar biomethane dan karbon kredit direncanakan mulai beroperasi secara komersial pada 2027. Inisiatif ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berarti mengurangi yang “kotor”, tetapi juga menciptakan pasar baru untuk energi dan molekul hijau.

Transformasi ini didukung oleh digitalisasi dan manajemen energi pintar. Layanan berbasis aplikasi memungkinkan pelanggan rumah tangga dan usaha kecil mengelola layanan gas secara digital, mulai dari penagihan hingga permintaan layanan. Di sisi operasional, digitalisasi juga digunakan untuk mengendalikan UAG (*Unaccounted for Gas*), yang pada periode Mei 2025 tercatat sekitar -0,091%, masih di bawah ambang batas -0,20%. Pengendalian ini penting karena setiap kebocoran atau kehilangan gas bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga tambahan emisi.

Dimensi keselamatan dan HSSE menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Hingga Oktober 2025, jam kerja aman kumulatif mencapai lebih dari 579 juta jam tanpa kecelakaan, dengan nol insiden kecelakaan kerja dan nol *process safety event* tier 1 dan 2 sejak 2009. Capaian ini bukan sekadar statistik, tetapi menunjukkan bahwa standar keselamatan tinggi adalah prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan publik, investor, dan regulator dalam industri energi berisiko tinggi.

Aksi iklim juga diperluas ke isu keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan melalui prinsip "*no net loss development*". Artinya, setiap dampak pembangunan harus diimbangi dengan aksi restorasi atau kompensasi. Berbagai program dijalankan, seperti penanaman mangrove di Lampung, arboretum di Muara Enim, konservasi terumbu karang, hingga program penangkaran satwa. Indeks keanekaragaman hayati (H') ditargetkan meningkat secara bertahap hingga di atas 3, yang menunjukkan tingkat keanekaragaman tinggi pada wilayah operasi berisiko. Sepanjang satu tahun, realisasi penurunan emisi dari inisiatif dekarbonisasi mencapai puluhan ribu ton CO₂e, dengan puluhan program berjalan paralel.

Dari sisi pasar, transparansi dan kualitas pengungkapan ESG menjadi keunggulan kompetitif. Perusahaan dengan pengungkapan ESG yang kuat cenderung mendapatkan biaya modal lebih murah, kemitraan lebih cepat, dan posisi pasar yang lebih baik. Konsistensi penerbitan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, skor tata kelola di atas

91%, serta peringkat risiko ESG yang relatif baik memperkuat daya tarik di mata investor. Di era ketika kesiapan transisi menjadi faktor utama keputusan investasi, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.



Ke depan, peta jalan transisi energi menempatkan beberapa faktor kunci sebagai penentu daya saing: penurunan emisi sebagai penggerak utama dekarbonisasi sektor gas, pengembangan green molecules seperti *biomethane* dan hidrogen *blending*, pemanfaatan digitalisasi dan AI untuk memangkas inefisiensi, penerapan internal carbon pricing untuk mempercepat investasi rendah karbon, serta keselamatan dan integritas aset sebagai fondasi kepercayaan pasar.

Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan, dan transformasi hijau, pengalaman ini menunjukkan bahwa integrasi keberlanjutan di tingkat perusahaan adalah mata rantai penting dalam ekonomi hijau. Negara menyiapkan kebijakan, sektor keuangan mengalihkan modal, dan korporasi menerjemahkannya menjadi keputusan operasional dan investasi nyata. Di titik inilah ekonomi hijau berhenti menjadi jargon, dan berubah menjadi strategi bisnis untuk bertahan, tumbuh, dan bersaing dalam lanskap energi dan ekonomi masa depan.

Building the Foundation for Credible ESG Disclosure Through Reporting Standards

Luluk Widyawati | Chairwoman of the Sustainability Working Team of the Indonesian Institute of Accountants (IAI)

Penguatan ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada kebijakan energi, pembiayaan, dan transformasi korporasi, tetapi juga pada fondasi tata kelola dan pelaporan yang kredibel. Tanpa standar pengungkapan yang jelas dan dapat dibandingkan, agenda keberlanjutan berisiko menjadi sekadar narasi, bukan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Inilah konteks penting dari pengembangan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) di Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).



Dalam praktik global, terdapat dua sudut pandang utama dalam pengungkapan keberlanjutan. Pendekatan *"inside-out"* melihat bagaimana aktivitas perusahaan berdampak pada lingkungan dan masyarakat, sedangkan pendekatan *"outside-in"* menilai bagaimana isu lingkungan dan sosial memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. SPK mengadopsi kedua pendekatan ini sekaligus. Informasi yang diungkap harus relevan baik bagi pemangku kepentingan luas—seperti masyarakat, karyawan, dan konsumen maupun bagi penyedia dana seperti investor dan kreditur, terutama jika dampak tersebut berpotensi memengaruhi arus kas, akses pendanaan, dan nilai perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan demikian, keberlanjutan ditempatkan sebagai bagian dari informasi keuangan bertujuan umum, bukan sebagai laporan tambahan yang terpisah.

Pengembangan standar ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak 2020, lembaga-lembaga internasional seperti IIRC, GRI, SASB, CDP, dan CDSB mulai menyatukan visi menuju pelaporan korporasi yang komprehensif. IFRS Foundation kemudian melanjutkan inisiatif ini melalui pembentukan ISSB dan penerbitan IFRS S1 dan S2 pada 2023. Di Indonesia, IAI merespons perkembangan ini melalui perubahan anggaran dasar, pembentukan dewan standar keberlanjutan, task force, konsultasi publik, hingga akhirnya menerbitkan Peta Jalan SPK dan Draft Eksposur. Puncaknya, pada Juli 2025 diterbitkan SPK yang terdiri dari PSPK 1 dan PSPK 2. Proses panjang ini menunjukkan bahwa standar keberlanjutan dibangun melalui *due process* yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan. Landasan konseptualnya menekankan bahwa informasi harus relevan, menyajikan secara wajar, material, dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan mudah dipahami. Konsep materialitas menjadi kunci: suatu informasi dianggap material jika penghilangan, salah saji, atau pengaburannya dapat memengaruhi keputusan pengguna utama laporan. Tidak ada ambang batas kuantitatif tunggal untuk menentukan materialitas; entitas harus menggunakan pertimbangan profesional dengan melihat konteks bisnis, risiko, dan peluang yang dihadapi.

PSPK 1 juga menegaskan bahwa entitas pelapor untuk pengungkapan keberlanjutan harus sama dengan entitas pelapor laporan keuangan. Artinya, jika laporan keuangan disusun untuk suatu grup usaha, maka pengungkapan keberlanjutan juga harus mencakup grup yang sama. Informasi keberlanjutan harus *"terhubung"* dengan informasi keuangan, sehingga pengguna dapat melihat kaitan antara isu keberlanjutan dengan kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Struktur pengungkapan dalam PSPK 1 dibangun di atas empat pilar: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Perusahaan harus menjelaskan bagaimana dewan dan manajemen mengawasi isu keberlanjutan, bagaimana strategi bisnis merespons risiko dan peluang keberlanjutan, bagaimana risiko tersebut diidentifikasi dan dikelola, serta bagaimana kinerja diukur melalui metrik dan target. Strategi juga harus mengaitkan isu keberlanjutan dengan model bisnis, rantai nilai, pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, baik saat ini maupun di masa depan. Ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan isu sampingan, melainkan bagian dari strategi inti perusahaan.

PSPK 2 secara khusus mengatur pengungkapan terkait iklim. Fokusnya pada risiko fisik baik yang bersifat akut seperti banjir dan badai, maupun kronis seperti kenaikan suhu dan perubahan pola hujan serta risiko transisi yang timbul dari peralihan menuju ekonomi rendah karbon. Selain risiko, peluang terkait iklim juga harus diungkap, misalnya dari produk rendah karbon, efisiensi energi, atau teknologi hijau.

Struktur PSPK 2 mengikuti empat pilar yang sama: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Dalam hal metrik, entitas diwajibkan mengungkap emisi gas rumah kaca *Scope 1*, *Scope 2*, dan *Scope 3*, risiko transisi dan fisik, peluang iklim, penyaluran modal, harga karbon internal, hingga keterkaitan remunerasi dengan target iklim. Target iklim yang diungkap mencakup target internal perusahaan maupun target yang diwajibkan oleh regulasi. Dengan demikian, kinerja iklim dapat dinilai secara kuantitatif dan dapat dibandingkan antar perusahaan.

Standar ini mulai efektif 1 Januari 2027 dengan opsi penerapan dini. Dalam tiga tahun pertama, pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim bersifat wajib, sementara risiko dan peluang keberlanjutan selain iklim masih bersifat sukarela. Pada periode transisi ini, perusahaan juga belum diwajibkan mengungkap emisi Scope 3 dan belum diwajibkan menggunakan GHG Protocol secara penuh. Pendekatan bertahap ini dirancang agar perusahaan memiliki waktu untuk membangun sistem data, kapasitas internal, dan tata kelola yang memadai.

Jika dikaitkan dengan agenda ekonomi hijau yang lebih luas, SPK menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa transisi hijau berjalan secara kredibel. Negara dapat menetapkan arah, sektor keuangan dapat mengalihkan pembiayaan, dan korporasi dapat bertransformasi, tetapi

tanpa data yang andal dan dapat dibandingkan, investor, regulator, dan publik tidak dapat menilai apakah transisi tersebut benar-benar terjadi. Standar pengungkapan keberlanjutan menjembatani antara visi ekonomi hijau dan realitas di lapangan, dengan menyediakan bahasa bersama untuk mengukur, membandingkan, dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan.

Dengan hadirnya PSPK 1 dan PSPK 2, keberlanjutan tidak lagi berada di pinggiran laporan tahunan. Ia menjadi bagian dari informasi keuangan bertujuan umum yang memengaruhi keputusan investasi, pembiayaan, dan strategi bisnis. Di sinilah peran akuntansi dan pelaporan menjadi strategis: bukan hanya mencatat masa lalu, tetapi membentuk masa depan ekonomi hijau yang lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya.

Humanizing ESG: Inspiring Behavioral Change to Strengthen Economic Resilience

Nadia Habibie | Executive Secretary of The Habibie Center

Krisis iklim tidak lagi hadir sebagai isu abstrak yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Hal ini telah menjelma menjadi pengalaman nyata yang menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan tekanan sosial. Banjir besar di Sumatera pada Desember 2025 menjadi salah satu pengingat paling keras tentang hal ini. Data BNPB per 10 Desember 2025 mencatat sedikitnya 969 orang meninggal, 252 orang hilang, dan lebih dari 900 ribu orang mengungsi. Tragedi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari kombinasi dinamika iklim global dan kelemahan struktural dalam cara manusia mengelola alam.

Banjir parah tersebut dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, dinamika atmosfer ekstrem akibat kombinasi monsun, siklon, dan gelombang atmosfer yang diperkuat oleh tren perubahan iklim global, sehingga hujan turun jauh lebih lebat dan lebih lama dari kondisi normal. Kedua, kerusakan daerah tangkapan air akibat deforestasi serta tata guna lahan yang buruk. Ekspansi pertanian dan pertambangan, terutama di bantaran sungai, menghilangkan fungsi hutan sebagai "spons" air sehingga limpasan permukaan meningkat tajam dan banjir bandang menjadi lebih sering dan lebih parah. Ketiga, kondisi fisik Sumatera yang belum climate-resilient dengan lereng curam Bukit Barisan, endapan vulkanik lepas dari gunung api, sungai yang pendek dan curam, serta sistem drainase kota yang terbatas membuat wilayah ini sangat rentan ketika hujan ekstrem datang.

Tragedi ini menunjukkan bahwa krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan tetapi krisis kemanusiaan dan krisis pembangunan. Hal tersebut langsung dengan cara manusia hidup, memproduksi, dan mengonsumsi. Data emisi gas rumah kaca Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi emisi



berasal dari berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, industri, dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Emisi tidak hanya dihasilkan oleh pabrik dan pembangkit listrik, tetapi juga oleh pola konsumsi rumah tangga, pilihan transportasi, dan gaya hidup modern yang boros energi.

Dalam ilustrasi sederhana, gaya hidup modern yang beremisi tinggi diibaratkan seperti "martabak kesejahteraan" yang gosong: bahan dasarnya mungkin baik, tetapi cara memasaknya salah sehingga hasil akhirnya rusak. Pesannya adalah kesejahteraan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya yang diambil dari alam, tetapi oleh bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan secara efisien dan inovatif. Dengan "mengubah resep" menggunakan teknologi bersih, energi terbarukan, dan pola konsumsi yang lebih hemat, kesejahteraan justru bisa menjadi lebih besar dan lebih berkualitas.

Pilihan individu juga berperan besar. Studi World Resources Institute menunjukkan bahwa dampak iklim dari berbagai aktivitas sehari-hari sangat bervariasi. Transportasi dan pola konsumsi makanan berada di spektrum dampak tertinggi, sementara pilihan energi rumah tangga yang efisien dan gaya hidup sederhana berada di spektrum dampak terendah. Artinya, perubahan kecil dalam cara kita berpergian, memilih makanan, dan menggunakan energi dapat berkontribusi nyata terhadap penurunan emisi nasional. Krisis iklim bukan hanya urusan negara atau korporasi besar, tetapi juga hasil agregasi dari jutaan keputusan individu setiap hari.

Di sisi lain, skala tantangan ini menuntut perubahan sistemik, terutama melalui sektor keuangan dan dunia usaha. Data sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi justru berisiko memperburuk kerusakan lingkungan dan pada akhirnya menekan pertumbuhan itu sendiri. Hubungan antara emisi dan pertumbuhan di Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan emisi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang justru menjadi beban struktural. Ini berarti krisis iklim bukan hanya ancaman ekologis, tetapi juga ancaman ekonomi dan keuangan.



Kesenjangan pembiayaan menjadi hambatan utama transisi. Kebutuhan pendanaan Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi hingga 2035 diperkirakan mencapai sekitar USD 758 miliar atau Rp12.000 triliun. Namun, pembiayaan berkelanjutan masih terkonsentrasi pada aspek sosial, sementara pembiayaan hijau murni relatif kecil. Di sisi lain, jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional masih belum terhubung dengan sistem pembiayaan formal. Tanpa mengalirkan modal ke sektor hijau dan ekonomi rakyat sekaligus, transisi berisiko timpang dan tidak inklusif.



Risiko iklim kini mulai diintegrasikan dalam manajemen risiko sektor keuangan melalui stress testing berbasis skenario iklim. Hasilnya menunjukkan bahwa emisi pembiayaan masih terkonsentrasi pada sektor energi, manufaktur, dan pertambangan yang merupakan sektor yang paling rentan terhadap kebijakan iklim dan perubahan teknologi. Jika transisi dilakukan terlalu lambat, kerusakan iklim akan makin besar. Jika dilakukan terlalu cepat tanpa persiapan sosial dan ekonomi, guncangan ekonomi dan pengangguran dapat meningkat. Karena itu, yang dibutuhkan adalah transisi yang tertib, kredibel, dan adil.

Dalam kerangka inilah peran tata kelola menjadi sangat penting. Integritas governance menentukan apakah kebijakan iklim hanya berhenti sebagai dokumen, atau benar-benar dijalankan dalam praktik. Di tingkat korporasi, fungsi seperti *corporate secretary* dan manajemen puncak berperan menghubungkan regulator, manajemen, dan karyawan, membangun budaya perusahaan yang peduli iklim, serta menciptakan insentif internal agar perilaku berkelanjutan menjadi kebiasaan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Seluruh rangkaian ini dari banjir Sumatera, pola hidup sehari-hari, struktur ekonomi, hingga tata kelola korporasi menunjukkan bahwa krisis iklim adalah persoalan bersama. Setiap orang adalah bagian dari masalah, dan karena itu juga bagian dari solusi. Transisi menuju ekonomi hijau tidak bisa hanya mengandalkan teknologi atau kebijakan, tetapi juga perubahan perilaku, pola pikir, dan nilai.



Ekonomi hijau pada akhirnya bukan sekadar soal menurunkan emisi, tetapi tentang membangun ketahanan. Ketahanan terhadap bencana, terhadap guncangan ekonomi, dan terhadap ketimpangan sosial. Tanpa transformasi menuju pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berintegritas, kesejahteraan akan semakin

rapuh di hadapan krisis iklim. Sebaliknya, dengan mengubah cara hidup, berproduksi, membiayai, dan mengelola, krisis iklim justru dapat menjadi momentum untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Corporate Secretary Leadership in Driving Governance and ESG Synergy

Katharine Grace | Chairwoman of Indonesia Corporate Secretary Association, Chief of Corporate Affairs of Sustainability of PT Bank Permata Tbk

Tata kelola perusahaan menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa agenda keberlanjutan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar terintegrasi ke dalam strategi dan praktik bisnis. Dalam kerangka ekonomi hijau, tata kelola tidak lagi hanya mengatur kepatuhan hukum dan perlindungan pemegang saham, melainkan juga memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan sosial diperhitungkan secara sistematis dalam setiap pengambilan keputusan. Konsep ini tercermin dalam berbagai kerangka regulasi dan pedoman. Di Indonesia, keuangan berkelanjutan diatur melalui POJK 51/2017, yang mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai ekosistem yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tata kelola perbankan juga diperkuat melalui POJK 17/2023 yang menekankan bahwa pengelolaan bank harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Di tingkat regional, ASEAN Corporate Governance Scorecard menegaskan bahwa dewan direksi dan komisaris harus mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material, termasuk risiko fisik dan risiko transisi iklim, dalam fungsi pengawasan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal. Pedoman Umum GCG Indonesia (PUG-KI) juga menempatkan dewan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas integrasi keberlanjutan ke dalam model bisnis.

Dalam kerangka ini, peran sekretaris perusahaan berkembang secara signifikan. Ia tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi korporasi dan hubungan dengan regulator, tetapi menjadi penghubung utama antara dewan, manajemen, dan agenda ESG. Fungsi ini mencakup pemberian nasihat kepada dewan mengenai risiko dan peluang ESG seperti perubahan iklim, keberagaman, dan keterlibatan pemangku kepentingan; edukasi kepada direksi tentang tren ESG global; serta pembentukan kerangka kerja ESG dan komite keberlanjutan.



Integrasi ini membutuhkan penyelarasan kebijakan dan regulasi. Pemetaan regulasi ESG, penyelarasan kebijakan internal dengan kerangka keberlanjutan, serta integrasi ESG ke dalam piagam, kebijakan, dan prosedur menjadi pekerjaan utama. Kolaborasi lintas fungsi antara dewan, manajemen senior, dan tim keberlanjutan guna memastikan bahwa ESG tidak berjalan terpisah, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang dan penciptaan nilai.

Aspek pelaporan dan transparansi menjadi krusial untuk menghindari *greenwashing*. Pengumpulan dan verifikasi data ESG, pengembangan *dashboard* ESG, serta penyusunan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan yang akurat dan transparan menjadi alat untuk membangun kepercayaan investor dan publik. Komunikasi yang baik tentang apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana dampaknya menjadi dasar reputasi dan legitimasi sosial perusahaan.

Peran koordinasi lintas fungsi juga menjadi kunci. Agenda ESG menyentuh hampir semua unit: manajemen dan dewan dalam pengambilan keputusan strategis, fungsi kepatuhan dalam memastikan kesesuaian dengan regulasi, fungsi risiko dalam melakukan penilaian risiko iklim dan sosial, pengadaan dalam mendorong praktik ramah lingkungan, TI dalam pengelolaan data ESG, serta keuangan dalam penganggaran dan pengukuran dampak finansial dari kebijakan keberlanjutan. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, ESG akan terfragmentasi dan kehilangan daya dorongnya.

Hubungan dengan pemangku kepentingan menjadi dimensi penting lainnya. Karyawan perlu memahami hak dan kewajiban mereka serta dibekali pelatihan ESG untuk meningkatkan kompetensi. Media dan publik membutuhkan informasi yang transparan dan akurat untuk menjaga reputasi perusahaan. Nasabah harus dilindungi datanya dan dilayani sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas. Pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Di saat yang sama, tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan melalui program pendidikan, literasi keuangan, dan inklusi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Semua upaya ini tidak terlepas dari konteks global dan nasional. Secara global, agenda keberlanjutan didorong oleh Kesepakatan Paris 2015 yang menargetkan pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5°C, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta komitmen pengurangan emisi sejak Protokol Kyoto. Di tingkat nasional, Indonesia menargetkan Net Zero Emissions pada 2060 dan memperkuat kerangka keuangan berkelanjutan melalui POJK 51/2017.

Sementara regulasi terus berkembang. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan, penyusunan rencana aksi, dan pengungkapan laporan keberlanjutan. Standar internasional IFRS S1 dan IFRS S2 memperkenalkan empat pilar utama pengungkapan: tata kelola, manajemen risiko, strategi, serta metrik dan target. Indonesia menyiapkan adopsi melalui SPK 1 dan SPK 2, termasuk pengungkapan iklim dan

keberlanjutan di luar iklim, penggunaan Taksonomi Hijau Indonesia sebagai indikator kinerja hijau, serta kewajiban assurance dan pelaporan digital.

Integrasi ESG ke dalam bisnis memerlukan tahapan yang sistematis: membangun fondasi, memetakan risiko dan peluang, menetapkan target dan solusi, mengukur kinerja, melibatkan pemangku kepentingan, mengoperasionalkan rencana, dan mengomunikasikan komitmen. ESG dipahami sebagai integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam analisis dan pengambilan keputusan untuk menjaga kinerja jangka panjang yang berkelanjutan.

Komunikasi keberlanjutan menjadi alat strategis. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan adalah sumber utama bagi investor untuk memahami kinerja, risiko, dan prospek perusahaan. Pelaporan yang berkualitas membangun kepercayaan, meningkatkan transparansi, membantu pengambilan keputusan pemangku kepentingan, dan membuka akses terhadap pembiayaan yang lebih luas. Tanpa komunikasi yang kredibel dan berbasis data, agenda keberlanjutan mudah dipersepsikan sebagai pencitraan semata.



Dalam kerangka ini, keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang kualitas tata kelola dan hubungan dengan manusia. Ekonomi hijau membutuhkan institusi yang mampu mengelola risiko, membangun kepercayaan, dan menyatukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanpa tata kelola yang kuat dan peran penghubung yang efektif di dalam organisasi, transformasi hijau akan rapuh. Sebaliknya, dengan governance yang solid, agenda ESG dapat menjadi motor perubahan menuju ekonomi yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.



Principles for Responsible Banking: Shaping the Future of Banking

Nyoman Gde Satrya Wibawa | Asia Pacific Regional Coordination Associate of United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)

Agenda ekonomi hijau di tingkat global tidak lahir dari ruang hampa melainkan dibentuk oleh konsensus internasional yang mendorong sektor keuangan untuk mengambil peran aktif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, manusia, dan planet. Salah satu aktor kunci dalam proses ini adalah UNEP Finance Initiative (UNEP FI), sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sejak 1992 menjembatani dunia keuangan dengan agenda keberlanjutan global. Selama lebih dari 30 tahun, UNEP FI bekerja bersama lebih dari 500 lembaga keuangan seperti bank, asuransi, investor yang mewakili lebih dari USD 170 triliun aset global, untuk membangun norma, kerangka kerja, dan praktik keuangan berkelanjutan.

UNEP FI tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi sebagai pembentuk standar global. Melalui berbagai inisiatif tematik mulai dari perubahan iklim, keanekaragaman hayati, manajemen dampak, hingga hak asasi manusia, UNEP FI mendorong sektor keuangan agar tidak lagi bersikap netral terhadap krisis lingkungan dan sosial. Pendekatannya bersifat lintas sektor: perbankan, asuransi, pemilik aset, hingga lembaga pembiayaan ekspor, semuanya didorong untuk mengintegrasikan ESG ke dalam bisnis inti mereka.

Dalam sektor asuransi, UNEP FI mengembangkan Principles for Sustainable Insurance (PSI), sebuah kerangka global yang diikuti oleh lebih dari 280 anggota dan 110 institusi pendukung di lebih dari 60 negara. PSI menempatkan industri asuransi dalam tiga peran strategis sekaligus: sebagai manajer risiko, sebagai penyedia perlindungan, dan sebagai investor. Melalui empat prinsip utama, industri asuransi didorong untuk memasukkan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan, bekerja sama dengan klien dan mitra untuk mengelola risiko dan mengembangkan solusi, berkolaborasi dengan pemerintah dan regulator, serta melaporkan kemajuan secara transparan. Kerangka ini tidak hanya bertujuan mengubah praktik internal perusahaan, tetapi juga mendorong perubahan sistemik di masyarakat.



Di sektor perbankan, UNEP FI mengembangkan Principles for Responsible Banking (PRB), yang kini menjadi kerangka paling luas digunakan untuk perbankan berkelanjutan. PRB dirancang sebagai panduan global agar bank mampu menyelaraskan strategi, portofolio, dan operasional mereka dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Kesepakatan Paris. Kerangka ini menekankan bahwa bank harus memahami dampak bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat (impact-based approach), lalu menetapkan target dan strategi untuk memaksimalkan dampak positif serta meminimalkan dampak negatif. PRB juga membentuk

komunitas global bank yang saling belajar, berinovasi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan dalam menghadapi risiko iklim dan sosial.

Untuk membantu implementasi, UNEP FI menyediakan berbagai bentuk dukungan: program pelatihan, forum pembelajaran sebaya, umpan balik ahli satu-satu, hingga alat bantu berbasis metodologi dampak (Impact Protocol). Bank yang menjadi penandatanganan PRB tidak hanya diminta berkomitmen secara normatif, tetapi juga mengikuti siklus implementasi yang mencakup penilaian dampak, penetapan target, integrasi ke dalam bisnis, serta pelaporan berkala. Kerangka ini bersifat non-binding secara hukum, tetapi kuat secara moral dan reputasional karena menjadi rujukan investor dan regulator global.



Temuan ini menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan bukan hanya idealisme moral, tetapi juga strategi bisnis yang rasional. Bank yang lebih serius mengelola risiko iklim dan sosial justru lebih dipercaya pasar dan lebih tahan terhadap guncangan. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian akibat krisis iklim, konflik geopolitik, dan fragmentasi ekonomi, kerangka seperti PRB dan PSI menjadi alat untuk membangun ketahanan jangka panjang sektor keuangan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kerangka global ini menjadi referensi penting. Agenda ekonomi hijau nasional mulai dari transisi energi, industri hijau, hingga keuangan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari standar dan ekspektasi global. Investor internasional, lembaga pemeringkat, dan regulator global semakin menggunakan prinsip-prinsip seperti yang dikembangkan UNEP FI untuk menilai kredibilitas sebuah institusi dan negara dalam agenda keberlanjutan.

Dengan demikian, ekonomi hijau bukan hanya proyek nasional, tetapi bagian dari transformasi global yang menuntut keselarasan antara kebijakan domestik dan norma internasional. Kerangka yang dikembangkan UNEP FI menunjukkan bahwa sektor keuangan dapat menjadi motor perubahan: mengarahkan modal ke aktivitas yang mendukung manusia dan planet, sekaligus menjaga stabilitas dan profitabilitas jangka panjang. Tanpa keterlibatan aktif sektor keuangan dalam kerangka seperti ini, transisi hijau akan kehilangan daya dorongnya. Sebaliknya, dengan mengadopsi prinsip-prinsip global

tersebut, ekonomi hijau dapat tumbuh bukan sebagai beban, tetapi sebagai fondasi baru bagi pembangunan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.



Laporan kemajuan dua tahunan ketiga PRB menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki dampak nyata. Lebih dari 350 bank di lebih dari 85 negara mewakili sekitar 50% aset perbankan global telah menjadi penandatangan. Bank-bank ini terbukti memiliki kinerja ESG yang lebih baik dibandingkan non-penandatangan: 61% dikategorikan sebagai ESG leaders, dibandingkan hanya 23% pada kelompok non-signatories. Skor ESG rata-rata mereka juga jauh lebih tinggi. Dari sisi bisnis, mereka menikmati biaya modal yang lebih rendah sekitar satu poin persentase lebih murah untuk ekuitas dan utang karena tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi. Hampir seluruhnya telah menempatkan isu keberlanjutan di level dewan atau manajemen puncak, dan hampir separuh mengaitkan remunerasi eksekutif dengan kinerja keberlanjutan.

”



Key Takeaways: Shaping Indonesia's Green Economy Transformation

Korporasi berada di titik krusial dalam transisi menuju ekonomi hijau. Di satu sisi, dunia usaha merupakan kontributor signifikan terhadap emisi, penggunaan sumber daya, dan tekanan sosial. Di sisi lain, korporasi juga memiliki kapasitas terbesar dalam hal modal, teknologi, inovasi, dan pengaruh pasar untuk mendorong perubahan. Karena itu, masa depan ekonomi hijau sangat ditentukan oleh sejauh mana dunia usaha bersedia mengubah cara mereka memproduksi, berinvestasi, dan menciptakan nilai.

Perubahan ini tidak lagi bersifat opsional. Tekanan regulasi, tuntutan investor, preferensi konsumen, serta risiko fisik akibat perubahan iklim membuat model bisnis lama semakin tidak relevan. Korporasi yang gagal beradaptasi akan menghadapi risiko reputasi, risiko pasar, risiko pembiayaan, hingga risiko kehilangan daya saing. Sebaliknya, korporasi yang mampu memimpin transisi akan memperoleh keunggulan strategis dalam ekonomi masa depan.

Dengan latar tersebut, rekomendasi berikut disusun untuk membantu korporasi tidak sekadar "berpartisipasi" dalam ekonomi hijau, tetapi menjadi aktor utama yang mengarahkan dan mempercepat transformasi.

1 Menjadikan Keberlanjutan sebagai Inti Strategi Korporasi

Keberlanjutan harus berpindah dari pinggiran organisasi ke pusat pengambilan keputusan. Artinya, isu iklim, sosial, dan tata kelola harus masuk ke dalam visi perusahaan, rencana jangka panjang, serta strategi pertumbuhan. Dewan direksi dan manajemen puncak perlu menjadikan keberlanjutan sebagai agenda tetap, bukan isu musiman atau responsif terhadap tekanan publik. Strategi bisnis harus menjawab pertanyaan: bagaimana perusahaan tetap tumbuh dalam dunia yang menghadapi krisis iklim, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan sosial yang meningkat? Tanpa jawaban strategis atas pertanyaan ini, keberlanjutan akan selalu kalah oleh target jangka pendek.

2 Menyelaraskan Target Bisnis dengan Target Iklim dan Sosial

Korporasi perlu menetapkan target penurunan emisi, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan dampak sosial yang jelas, terukur, dan berbasis sains. Target ini harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional tahunan, anggaran, dan indikator kinerja. Lebih jauh, target keberlanjutan harus terhubung dengan sistem insentif dan evaluasi kinerja manajemen. Selama keberhasilan manajer hanya diukur dari laba dan pertumbuhan, agenda hijau akan selalu menjadi prioritas kedua.

3 Mengubah Rantai Pasok Menjadi Rantai Nilai Berkelanjutan

Sebagian besar dampak lingkungan dan sosial sering terjadi di luar pagar perusahaan, yaitu di rantai pasok. Korporasi perlu memetakan dampak pemasok, menetapkan standar keberlanjutan, dan membantu pemasok terutama yang kecil untuk memenuhi standar tersebut. Pendekatan ini harus berbasis kemitraan, bukan sekadar audit dan sanksi. Transfer teknologi, pendampingan manajemen, dan akses pembiayaan menjadi kunci agar rantai pasok benar-benar bertransformasi, bukan sekadar mengganti pemasok yang bermasalah.

4 Mengarahkan Investasi ke Inovasi Rendah Karbon

Belanja modal adalah pernyataan masa depan perusahaan. Jika investasi masih didominasi teknologi lama yang intensif karbon, maka perusahaan sedang mengunci diri pada risiko masa depan. Korporasi perlu memprioritaskan investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, digitalisasi untuk pengurangan emisi, dan model ekonomi sirkular. Inovasi tidak selalu berarti teknologi mahal; sering kali ia berarti mengubah proses, desain produk, dan cara distribusi agar lebih hemat sumber daya dan rendah emisi.



5 Mengintegrasikan Risiko Iklim dalam Keputusan Keuangan

Risiko iklim baik fisik maupun transisi harus masuk dalam analisis proyek, penilaian aset, dan keputusan pembiayaan. Proyek yang terlihat menguntungkan hari ini bisa menjadi beban di masa depan jika terpapar kebijakan karbon, perubahan pasar, atau bencana iklim. Penggunaan skenario iklim dalam perencanaan bisnis membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tangguh dan tidak terjebak pada optimisme jangka pendek.

6 Membangun Tata Kelola Keberlanjutan yang Kredibel

Struktur tata kelola harus memastikan keberlanjutan diawasi di tingkat tertinggi. Dewan direksi perlu memiliki tanggung jawab jelas atas isu ESG. Fungsi keberlanjutan harus memiliki kewenangan lintas unit, bukan hanya peran koordinatif. Pelaporan keberlanjutan perlu mengikuti standar yang diakui secara internasional dan didukung oleh assurance independen. Transparansi adalah mata uang utama dalam ekonomi hijau.

7 Menghindari Greenwashing dan Mengutamakan Transformasi Nyata

Klaim hijau yang tidak didukung data dan perubahan nyata akan merusak reputasi. Korporasi harus berani jujur tentang tantangan dan keterbatasan, sambil menunjukkan arah perbaikan yang jelas. Komunikasi harus menjadi cermin dari transformasi internal, bukan alat untuk menutupi stagnasi.

8 Mengelola Dampak Sosial dari Transisi

Perubahan model bisnis akan berdampak pada tenaga kerja dan komunitas. Korporasi perlu menyiapkan program pelatihan ulang, mobilitas internal, dan dialog dengan pekerja serta masyarakat sekitar. Mengabaikan aspek sosial akan menciptakan konflik yang justru menghambat transformasi.

9 Berkolaborasi dalam Ekosistem

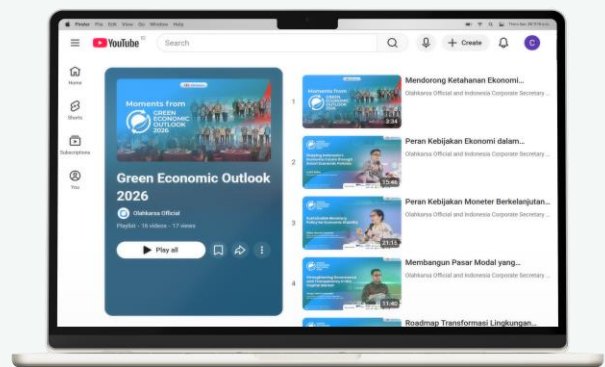
Ekonomi hijau tidak bisa dibangun sendirian. Korporasi perlu berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, startup, akademisi, dan masyarakat sipil untuk inovasi, standarisasi, dan pembiayaan. Kolaborasi mempercepat pembelajaran dan menurunkan biaya transisi.

10 Mendefinisikan Ulang Keberhasilan Korporasi

Keberhasilan tidak lagi cukup diukur dari laba dan ekspansi. Korporasi masa depan adalah yang mampu tumbuh sambil menjaga kepercayaan publik, ketahanan sosial, dan daya dukung lingkungan. Mengubah cara mengukur sukses adalah langkah terakhir, sekaligus yang paling menentukan, dalam menjadikan ekonomi hijau sebagai fondasi bisnis jangka panjang.

Tonton seluruh sesi Green Economic Outlook 2026

Melalui Youtube  @OlahkarsaOfficial



bit.ly/GEOPlaylist

Green Economic Outlook 2026

Recap

Sustainability Insight Report